

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL

INDONESIA'S DEFENSE DIPLOMACY IN ACHIEVING THE NATIONAL INTEREST

Budyanto Putro Sudarsono¹, Jonni Mahroza², Surryanto D.W.³

Universitas Pertahanan
(budyputro99@gmail.com)

Abstrak - Dalam mencapai dan mengamankan kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, antara lain, kekuatan militer, ekonomi, politik, intelijen dan sebagainya. Penggunaan militer sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi. Semua pihak pasti sepakat bahwa dalam berdiplomasi, negosiasi merupakan inti dari diplomasi, sehingga kemenangan dalam bernegosiasi juga bisa diartikan sebagai kemenangan dalam berdiplomasi. Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, kekuatan bargaining position merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Posisi tawar suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh *national power* bangsa dan salah satu komponen yang menonjol dari *national power* tersebut adalah komponen militer. Hal inilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi negara. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional serta bagaimana mengoptimalkannya dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan wilayah Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional belum optimal dan capaiannya masih sebatas pada isu pertahanan semata; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dimensi kapasitas dan kapabilitas TNI, dimensi Kerjasama antar instansi dan dimensi penyusunan strategi diplomasi.

Kata Kunci : Diplomasi pertahanan, strategi diplomasi, kepentingan nasional

Abstract - In achieving and securing national interests, diplomacy always plays significant role. In its implementation, the state uses all its national means available resources including military, economy, politics, intelligence and any other means available. Using military as an instrument in diplomacy is inevitable. It is general knowledge that negotiation form a core component of diplomacy. Wining in negotiation, therefore, can be likened to wining in diplomacy. In order to gain leverage during negotiations, gaining a better bargaining position is an important requirement and this strongly

¹ Alumni Program Studi Strategi Pertahanan Darat Cohort 5 Tahun 2018 Universitas Pertahanan.

² Sesprodi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Dosen Tetap Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

relies on a nation power of which one of the key components of is the military. In this regard, the military power can not be separated from state diplomacy. This research is designed to understand the role of Indonesia's defense diplomacy in achieving national interests. The objectives of this research are : First, to analyze the role of Indonesian defense diplomacy in achieving national interests and how to optimize it, and second, to analyze the factors that influence this role. This research uses the qualitative method. All data is obtained through observation, interviews and literature studies. Data analysis is carried out simultaneously with data collection when the researcher is in the field. The research location is at Jakarta City. We can draw two conclusions from the result of the research: 1) The role of defense diplomacy in achieving national interests has not been optimal and its achievements are still limited to defense issues only; 2) Factors influencing the role of defense diplomacy include the TNI's capacity and capability, cooperation between agencies, and formulation of diplomacy strategy.

Keywords: Defense diplomacy, diplomacy strategy, national interest

Pendahuluan

Dalam pergaulan internasional, setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Tidak jarang ditemukan, kepentingan nasional suatu negara beririsan dan bahkan berbenturan dengan kepentingan negara lain. Hal tersebut rentan mengantarkan negara tersebut dalam ketegangan dan terkadang berujung konflik. Negara menggunakan cara diplomasi untuk mengamankan atau meraih kepentingan nasionalnya.

Diplomasi cenderung diasosiasikan sebagai *soft power* dan penggunaan kekuatan militer dianggap sebagai *hard power*. Dalam *The advance learners dictionary of current English* dinyatakan bahwa “*diplomacy is skill in making arrangement cleverness in dealing with people so that they remain friendly and willing to help*”. Sedangkan Sir Ernest Satow, mengartikannya sebagai “*the application of tact and intelligence to the conduct of foreign relation between government and independent state*”. Ini

bisa diartikan bahwa diplomasi merupakan suatu keahlian dalam menentukan cara memenangkan kepentingan kita tanpa harus menimbulkan permusuhan. Dikaitkan dengan pertahanan, maka diplomasi pertahanan bisa bermakna sebagai suatu cara memenangkan kepentingan bangsa dengan menggunakan militer/pertahanan sebagai alat atau sumber daya tanpa harus mengedepankan kekerasan sebagai jalannya. Diplomasi pertahanan juga bisa dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang utamanya dilakukan oleh perwakilan departemen pertahanan atau juga institusi pemerintah yang lainnya dengan tujuan untuk memenangkan kepentingan nasional di bidang keamanan dan pertahanan langkah yang ditempuh menggunakan cara negosiasi dan instrument diplomatik lainnya.

Dewasa ini, penggunaan militer dalam urusan diplomasi negara tidak lagi murni dianggap sebagai penggunaan kekerasan (*violence means*), yaitu ketika banyak negara telah mentransformasi

peran militernya menjadi salah satu alat diplomasi untuk pencapaian tujuan dengan tidak melibatkan unsur kekerasan ataupun ancaman di dalamnya. Banyak negara telah mencontohkan bagaimana militer telah menjadi salah satu paket diplomasi yang penggunaannya tidak hanya terbatas pada urusan pertahanan keamanan saja. Contoh yang bisa diambil dari penggunaan militer dalam urusan diplomasi tanpa melibatkan unsur kekerasan di dalamnya serta tidak langsung terkait dengan isu keamanan ditunjukkan oleh Tiongkok saat negara tersebut berusaha memenangkan tender pembuatan bandara dan jalan di Tanzania. Tiongkok menggunakan militernya sebagai alat diplomasi dengan cara memberikan bantuan asistensi militer kepada militer Tanzania serta memberikan sumbangan pembangunan ribuan rumah bagi prajurit Tanzania. Cara tersebut berhasil mengambil hati pemerintah Tanzania dan pada akhirnya tender tersebut dimenangkan oleh Tiongkok.

Keterlibatan TNI dalam diplomasi negara dilakukan dengan beragam peran. Dalam menjaga perdamaian dunia, TNI telah menjadi salah satu partisipan tetap pada misi pasukan perdamaian PBB. Di wilayah ASEAN, TNI juga berperan aktif membangun komunikasi dengan militer negara sahabat melalui forum-forum pertemuan seperti salah satunya adalah *ASEAN Defense Ministerial Meeting* yang merupakan forum yang bertujuan untuk

membangun persepsi yang sama dengan angkatan bersenjata negara-negara ASEAN dan mitranya mengenai keamanan regional, meningkatkan saling percaya dan mengidentifikasi bidang-bidang baru untuk kerja sama. Indonesia juga bahkan pernah menjadi inisiator pertemuan *Jakarta International Defense Dialog (JIDD)*, yang merupakan suatu forum komunikasi internasional yang membahas bidang keamanan dunia. Ini sesuai dengan salah satu aspek diplomasi pertahanan yaitu membangun saling percaya (*Defense Diplomacy for Confidence Building Measures*).

Dari gambaran penjelasan peran TNI tersebut, keterlibatan TNI dalam diplomasi negara masih terbatas pada diplomasi yang terkait langsung dengan kepentingan negara di bidang pertahanan maupun keamanan. Pelibatan TNI dalam diplomasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan negara di bidang lain khususnya ekonomi dan politik masih belum signifikan.

Belum maksimalnya keterlibatan militer dalam diplomasi total negara tentu saja memiliki penyebab dan latar belakang. Ada beberapa kemungkinan belum maksimalnya TNI dalam diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan di luar urusan pertahanan dan keamanan yaitu, pertama, hubungan antar kelembagaan belum sinergi khususnya dengan kementerian Luar Negeri. Kedua, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki

TNI masih terbatas dikaitkan pada pelibatangannya dalam diplomasi total negara. Ada beberapa kondisi yang harus dimiliki oleh TNI untuk dalam rangka menjadikannya sebagai pilihan utama negara dalam melakukan diplomasi, misalnya TNI harus memiliki harga tawar, *bargaining position*, yang baik setidaknya di wilayah Asia. Selain itu, koneksi hubungan dengan militer negara tertentu juga mempengaruhi cara pandang dan perilaku negara lain terhadap TNI. Dengan demikian, TNI harus lebih jeli dalam menentukan prioritas pembinaan hubungan kerjasama militer dengan negara sahabat. Semestinya, sebelum memutuskan untuk meningkatkan hubungan kerjasama militer dengan negara lain, TNI harus melihat prioritas kepentingan nasional yang bisa diperjuangkan melalui diplomasi dengan cara, salah satunya berkoordinasi dengan kementerian Luar Negeri terkait negara mana yang menjadi target diplomasi negara.

Dari sedikit penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa TNI cukup aktif terlibat dalam kegiatan diplomasi negara. Namun demikian, peran TNI dalam diplomasi dirasa belum maksimal dan masih dapat dioptimalkan lagi. Padahal, militer dapat memainkan peranan penting dalam diplomasi untuk menunjang diplomasi negara. Keterlibatan militer dalam diplomasi negara dapat mempermudah negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Berdasarkan uraian

tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan disini adalah bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Mengacu kepada rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana peran TNI dalam diplomasi pertahanan, bagaimana mengoptimalkan peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional, bagaimana hubungan TNI dengan dengan Kemlu, sebagai *leading sector* diplomasi negara?

Tinjauan pustaka

Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, hubungan luar negeri dilaksanakan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Politik luar negeri dalam pasal 3 dan 4, disampaikan bahwa menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional dan dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan. Maksud dari “bebas aktif” adalah politik luar negeri yang pada hakekatnya bukan merupakan politik

netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Wakil presiden pertama RI, Mohammad Hatta, di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 2 September 1948 di Yogyakarta, menyampaikan:

“Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan Negara kita, hanya harus memilih pro Russia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya”.⁶

Konsep pemikiran inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi negara

dalam menentukan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Teori Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan merupakan seluruh cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih jauh dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan⁷. Diplomasi pertahanan digunakan sebagai alat untuk mencapai target kebijakan luar negeri suatu negara.

Gregory Winger dalam tulisannya *The Theory of Defense Diplomacy* menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan merupakan suatu cara penggunaan militer bukan untuk kekerasan, seperti pertukaran perwira, kunjungan kapal perang, latihan militer bersama dalam rangka mencapai kepentingan internasional suatu negara. Masih dalam tulisan Winger, Andre Cottey dan Anthony Foster menyatakan bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan militer dalam masa damai sebagai alat untuk kebijakan keamanan

⁶ M. Hatta, *Mendayung Antara Dua Karang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

⁷ Rodon Pedrason, *Asean Defence Diplomacy: The Road To Southeast Asian Defence Community*, (Heidelberg: University Heidelberg, 2015) hlm. 15.

dan hubungan luar negeri. Hal ini diperkuat oleh Martin Edmons yang mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penggunaan militer untuk operasi selain perang dengan memanfaatkan pengalaman latihan dan disiplinnya untuk mencapai kepentingan nasional baik di dalam maupun di luar negeri⁸.

Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan di tingkat global, regional dan bilateral. Dari semua itu, diplomasi dalam tingkatan bilateral memainkan peranan yang sangat penting. Keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan. Namun, secara parsial terdapat karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara⁹:

- 1) *Defense diplomacy for Confidence Building Measures;*
- 2) *Defense Diplomacy for defense capabilities;*
- 3) *Defense Diplomacy for Defense industry.*

⁸ Gregory Winger, *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy*, (Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, 2014).

⁹ I. Syawfi, *Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hal. 14.

Teori Sinergi

Covey mengartikan sinergisitas sebagai “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergisitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan sinergisitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai.¹⁰

Konsep Strategi

Tjiptono menyampaikan strategi diadopsi dari bahasa Yunani yang berarti suatu ilmu atau seni untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa dimaknai sebagai suatu rencana untuk membagi kekuatan militer, menggunakannya dan menempatkannya di tempat tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹ Adapun Rangkuti berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan

¹⁰ Stephen Covey, “The 7 Habith of Highly Effective People”, *Jurnal Pembangunan Jangka Menengah* 2005-2010.

¹¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi 3*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997).

yang telah di tetapkan berdasarkan misi yang telah di tetapkan sebelumnya.¹² Sedangkan menurut pendapat Joni dalam Anitah menyatakan bahwa strategi adalah ilmu dan kemampuan di dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan atau yang dapat dikerahkan guna mencapai tujuan yang ditetapkan.¹³ Sejalan dengan itu, McNichols dalam J.Salusu menyatakan bahwa strategi merupakan suatu seni dan kecakapan dalam menggunakan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.¹⁴

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan rencana yang berisikan cara atau jalan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam studi maupun isu hubungan internasional. Setiap negara pasti

memiliki kepentingan nasional yang sering menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyusun strategi hubungan internasionalnya. Kebijakan politik luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut. Negara merupakan aktor yang paling dominan dalam memainkan peran untuk mencapai kepentingan nasional tersebut.

Para ahli memiliki pendapat yang beragam dalam mengartikan dan mendefinisikan kepentingan nasional. Menurut H.J. Morgenthau, Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara dalam melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini, para pemimpin negara merumuskan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.¹⁵ Sementara itu, Paul Seabury mendefinisikan kepentingan nasional melalui dua sudut pandang yaitu secara deskriptif yang memiliki arti sebagai tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara normatif, kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita dari suatu bangsa dimana bangsa tersebut berusaha mencapainya dengan cara

¹² Freddy Rangkuti, *SWOT Balance Scorecard*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 183.

¹³ Sri Anitah W., "Strategi Pembelajaran Matematika", (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 124.

¹⁴ Salusu J., *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, (Jakarta: Grasindo, 2006) hlm. 101.

¹⁵ H.J. Morgenthau, *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*, (New York: University Press of America, 1951).

berhubungan dengan negara lain.¹⁶ Daniel S. Papp, mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas.¹⁷

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan cita-cita yang menjadi target yang harus dicapai oleh negara, dimana cita-cita tersebut memiliki multi dimensi baik politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.

Konsep Kebijakan Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Menurut Walter Carlsnaes, kebijakan luar negeri adalah Tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah maupun non pemerintah) yang berada di luar wilayah teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan atau arah yang dinyatakan secara eksplisit, dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama

¹⁶ Luthfiana Chandra A.M dan Mahrita. *Defining National Interest*, (2012).

¹⁷ D. S. Papp, *Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, Second Editions*", (New York: MacMillan Publishing Company, 1988), hlm. 29.

negara atau komunitas yang berdaulat.¹⁸ Sedangkan menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Gagasan kebijakan luar negeri, dapat dibagi menjadi empat komponen dari yang umum hingga ke arah yang lebih spesifik yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan, dan tindakan.¹⁹ Sementara itu, Mark R. Amstutz, mendefenisikan politik atau kebijakan luar negeri sebagai "*as the explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries*".²⁰ Pada defenisi ini, menekankan pada tindakan dari pejabat pemerintah untuk merancang kepentingan nasional negaranya agar dapat mempromosikan kepentingan nasional tersebut, melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa politik luar negeri ini

¹⁸ Walter Carlsnaes, "The Agency-Structure Problem In Foreign Policy Ananalysis", *International Study Quarterly*. Vol.36, No.3, 2016, hlm. 245-270.

¹⁹ K. J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy", *International Studies Quarterly*, Vol. 14, No.3, 1970, hlm. 233-309.

²⁰ Mark R. Amstutz, *International Ethics: Concepts, Theories, and Cases in Global Politics 4th Ed.*, (Boulder: Rowman and Littlefield, 2013).

merupakan konsep yang digunakan pemerintah atau negara maupun non pemerintah untuk merencanakan dan berkomitmen untuk menjadi pedoman dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain di lingkungan eksternal

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu sebuah metode penelitian dengan maksud memahami fenomena yang dialami oleh subyek pelaku antara lain perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, yang kemudian diungkapkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah²¹

Subyek penelitian adalah para informan yang terkait dalam bidang tugasnya masing-masing. Objek penelitian ini adalah Peran TNI dalam diplomasi pertahanan, Kapasitas dan Akpabilitas TNI dalam diplomasi, dan hubungan kerja TNI dengan kementerian Luar Negeri dalam hal diplomasi.

Hasil Penelitian

Peran Diplomasi Pertahanan TNI

Dalam peran diplomasi pertahanan ini, hanya akan memfokuskan pada diplomasi pertahanan melalui pengiriman

pasukan perdamaian dan penempatan atase pertahanan. Hal ini dikarenakan kedua fokus tersebut, sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu yang menjadi sorotan adalah belum adanya penyusunan strategi diplomasi pertahanan secara utuh dan menyeluruh yang melibatkan seluruh *stakeholders*. Hal tersebut sangat jelas tergambar dalam pelaksanaan tugas atase pertahanan, serta belum optimalnya pemanfaatan diplomasi pertahanan untuk kepentingan di luar isu pertahanan dan keamanan yang hal tersebut dapat dilihat dalam diplomasi pertahanan melalui pengiriman pasukan perdamaian PBB.

Pasukan Perdamaian Indonesia

Pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh TNI. Salah satu tujuan dari diplomasi pertahanan yaitu untuk mencegah terjadinya konflik dan mempengaruhi kebijakan negara sasaran atau setidaknya menciptakan persepsi positif terhadap militer (TNI) atau negara. Ada dua bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam operasi perdamaian PBB, yaitu negara yang menjadi anggota PBB dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan dana untuk mendukung operasi perdamaian tersebut dan kedua, dengan cara mengirimkan

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 6).

pasukan perdamaian langsung ke daerah konflik.

Keterlibatan TNI dalam misi perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957 ketika untuk pertama kalinya TNI mengirimkan pasukan perdamaian sejumlah 559 personil yang tergabung dalam pasukan PBB *United Nation Emergency Force* (UNEF) dalam rangka ikut meredakan konflik antara Mesir dengan Inggris. Misi pertama pasukan perdamaian TNI dianggap berhasil oleh PBB dan sejak saat itu TNI terus mendapat kepercayaan dari PBB untuk membantu perdamaian di berbagai belahan dunia. Misi kedua UNOC di Kongo tahun 1960 berjumlah 1.074 orang, selanjutnya misi-misi yang diikuti Kontingen Garuda diterjunkan untuk menjaga perdamaian di berbagai negara antara lain UNEF di Mesir (1973-1979), UNIMOG di Irak (1988,1989,1990), UNTAC di Kamboja (1992-1992), UNIKOM di Kuwait (1993), UNPROFOR di Bosnia (1995), UNPREDEP di Macedonia (1996), UNTAES di Slovenia Timur (1997), UNAMSIL di Sierra Leone (2002), Monuc di Kongo (2004), dan sejak 2006 sampai saat ini Indonesia mengirimkan misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) ke Lebanon, Kizit ke Kongo dan Haiti serta Unamid (United Nations Mission In Darfur) ke Darfur-Sudan, serta Mali tahun 2015.

Sejauh ini, pelaksanaan tugas perdamaian TNI di bawah bendera PBB dianggap cukup berhasil terutama dalam

melakukan komunikasi dan pembinaan warga di daerah konflik. Penerapan metode pembinaan teritori dalam pelaksanaan tugas perdamaian membuahkan hasil yang sangat positif dalam pencapaian tugas. Salah satu daerah tugas pasukan TNI secara reguler ditempatkan adalah di Lebanon. Kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal di Lebanon Selatan dimanfaatkan dengan baik oleh TNI. Interaksi yang dilakukan oleh TNI dengan masyarakat di Lebanon Selatan menghasilkan sebuah penerimaan yang sangat baik terhadap keberadaan pasukan TNI di wilayah tersebut. Upaya untuk mendapatkan penerimaan serta pengelolaan terhadap interaksi tersebut menjadi sebuah fenomena tersendiri baik dikalangan kontingen UNIFIL maupun masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut terkait dengan sulitnya kontingen UNIFIL dari negara lain untuk dapat diterima secara baik oleh masyarakat di Lebanon Selatan.

Terlepas dari beragam keberhasilan, pelaksanaan tugas pasukan perdamaian Indonesia yang juga merupakan bentuk diplomasi pertahanan dan bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional belum dimanfaatkan secara maksimal. Diplomasi militer yang dilakukan oleh *peacekeeping* TNI baru sebatas pada isu pertahanan dan keamanan saja, padahal peluang untuk bisa memanfaatkan misi tersebut untuk mencapai kepentingan

nasional di bidang lain terutama ekonomi cukup terbuka luas. Beberapa negara kontributor pada pasukan perdamaian PBB telah mencontohkan dalam pelaksanaan tugasnya, pasukan tersebut juga ikut memasarkan produk dalam negerinya di negara tempat bertugas. Hal ini tentu perlu untuk menjadi perhatian bagi TNI untuk bisa lebih berkontribusi aktif dalam mencapai kepentingan nasional melalui peran diplomasi militer yang dimainkannya.

Atase Pertahanan RI

Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh perangkat korps diplomatik, yaitu duta besar, kuasa usaha dan atase-atase. Untuk atase sendiri terdiri atas dua bagian yaitu atase pertahanan dan atase teknis. Atase pertahanan dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan ke Kementerian Luar Negeri dan ditempatkan di kedutaan besar negara bersangkutan, serta diberi kedudukan sebagai seorang diplomat. Tugasnya adalah memberikan nasehat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada Duta Besar berkuasa penuh. Dalam pelaksanaan tugasnya, atase pertahanan belum maksimal mencapai sasaran. Tidak jarang dalam tugasnya terjadi miss komunikasi antara atase

pertahanan dengan duta besar sebagai kepala perwakilan. Terdapat beberapa kasus ketika misi yang diemban oleh atase pertahanan belum sinkron dengan misi kepala perwakilan, sehingga pelaksanaan tugas diplomasi terkesan berjalan sendiri-sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu antara lain :

- a) Belum adanya pemahaman yang sama bahwa duta besar merupakan kepala perwakilan yang bertugas sebagai *head of mission* dan mengendalikan pelaksanaan tugas diplomasi di negara akreditasi. Masih ada anggapan bahwa duta besar merupakan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, padahal duta besar adalah perwakilan dari negara untuk menjalankan tugas diplomasi negara.
- b) Dalam penyusunan *mission paper* baik oleh Kementerian Luar Negeri maupun TNI belum dilaksanakan secara terkoordinasi. *Mission paper* merupakan panduan pelaksanaan diplomasi di suatu negara yang berisi prioritas sasaran serta strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan diplomasi. Penyusunan *mission paper* untuk kepala perwakilan masih dilakukan oleh calon duta besar dan belum dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri sehingga *mission paper* tersebut tidak tercapai. Namun, yang lebih disayangkan lagi, Atase Pertahanan RI sebagian besar, jika tidak seluruhnya, tidak memiliki

mission paper sebagai panduan pelaksanaan tugas diplomasinya.

Kapasitas dan Kapabilitas TNI dalam Melaksanakan Diplomasi Pertahanan

Dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh militer menjadi salah satu penentu utama keberhasilan pelaksanaan diplomasi tersebut. Militer yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik cenderung untuk berhasil dalam melaksanakan misi diplomasinya. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa diplomasi yang dilakukan pada umumnya bertujuan untuk merubah atau mempengaruhi kebijakan suatu negara baik dengan cara keras ataupun dengan cara halus, yang dalam pelaksanaannya kerap melakukan tawar menawar atau *bargaining*, sehingga kuatnya posisi tawar menjadi jaminan berhasilnya diplomasi yang dijalankan. Posisi tawar instrumen diplomasi dalam hal ini militer sangat bergantung pada kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya.

Saat ini, kapasitas yang dimiliki oleh TNI masih jauh dari harapan untuk dapat mengemban tugas diplomasi militer dengan target dapat mempengaruhi atau merubah kebijakan negara sasaran TNI belum memiliki sarana yang memadai dalam melakukan diplomasi militer seperti kelengkapan persenjataan dan alutsista serta dukungan anggaran yang ideal. Posisi tawar militer sangat

bergantung pada kuatnya militer tersebut terutama ditinjau dari segi kelengkapan peralatan perang.

Dari segi kapabilitas atau kemampuan yang mengarah pada tugas diplomasi, secara terbuka diakui bahwa TNI juga belum memiliki kemampuan yang cukup baik dari segi personil maupun dari segi strategi. Dari segi personil, disadari bahwa personil TNI masih belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan dalam bidang diplomasi. Keterbatasan bahasa dan wawasan menjadi penghambat dominan dalam melaksanakan tugas diplomasi.

Saat ini TNI memiliki banyak kerja sama dengan militer negara sahabat, baik itu melalui program latihan bersama, pendidikan dan operasi. Dari kerjasama tersebut, tidak sedikit prajurit TNI yang di kirim ke luar negeri untuk melakukan program-program tersebut, namun harus diakui bahwa kontribusi prajurit khususnya terkait dengan diplomasi masih perlu ditingkatkan. Dari sisi strategi, TNI masih perlu merumuskan kembali suatu strategi yang jitu dan komprehensif dalam diplomasi. Kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh TNI baik oleh Mabes TNI maupun Mabes Angkatan terus menerus dilaksanakan bahkan sudah menjadi suatu program tetap, tapi pelaksanaannya belum tersusun dalam suatu strategi diplomasi TNI yang utuh. Pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh angkatan (TNI AD, AL dan AU) masih

dilaksanakan secara sendiri-sendiri tanpa strategi yang jelas sehingga hasilnya kurang dirasakan. Hal itulah yang mendorong Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam program kerjanya memasukkan penguatan diplomasi militer sebagai salah satu target yang ingin dicapai.

Pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara bahkan Mabes TNI masih terkesan sebagai rutinitas program semata tanpa adanya target capaian tertentu layaknya suatu strategi. Masing-masing Angkatan melakukan diplomasi belum didasarkan pada suatu strategi tertentu yang menuntut adanya target capaian yang ditentukan sebelumnya.

Hubungan TNI dengan Kemlu dalam Hal Diplomasi

Dalam pelaksanaan diplomasi, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait terutama Kementerian Luar Negeri sebagai *leading sector* diplomasi negara merupakan hal yang tidak bisa dihindari mengingat salah satu fungsi dari Kementerian Luar Negeri adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Sejauh ini, komunikasi antara TNI dengan Kementerian Luar Negeri terbilang sudah berjalan lancar dan baik. Indikatornya terlihat dari tingkat pelibatan TNI dalam pengambilan

keputusan penting terkait kebijakan luar negeri. Beberapa aspek yang dapat dijadikan contoh adalah diplomasi kewilayahan, diplomasi keamanan internasional, diplomasi ekonomi, diplomasi kemanusiaan, kerjasama teknis, dsb. Pada diplomasi kewilayahan, Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi erat dengan TNI, khususnya dalam menghadapi adanya perselisihan terkait garis demarkasi (darat), maupun delimitasi (laut) dengan negara – negara tetangga.

Namun demikian, koordinasi antara TNI dengan kementerian Luar Negeri dalam hal penyusunan strategi diplomasi belum berjalan dengan baik. Meskipun di lapangan komunikasi antara personil intens terjadi, namun pada tataran kebijakan hal tersebut belum berjalan dengan baik. Dari data yang diperoleh dari beberapa sumber di Kementerian Luar Negeri, terlihat bahwa pelibatan TNI dalam diplomasi bersama Kementerian Luar Negeri masih sangat kecil.

Pembahasan Hasil penelitian

Dalam mencapai dan mengamankan kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, antara lain, kekuatan militer, ekonomi, politik, intelijen dan sebagainya. Penggunaan militer sebagai salah satu instrument dalam diplomasi

sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi.

Peran diplomasi pertahanan TNI

Pasukan Perdamaian PBB

Pengiriman pasukan perdamaian yang tergabung dalam *peacekeeping mission* PBB merupakan wujud komitmen yang kuat dari pemerintah RI terhadap perdamaian dunia sekaligus memberi arti penting dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan wujud nyata politik luar negeri bebas aktif serta meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.

Dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan perdamaian dunia, TNI sebagai salah satu ujung tombak kekuatan militer yang mewakili Indonesia di bawah kendali PBB telah mencapai banyak keberhasilan sehingga terus mendapat kepercayaan dari PBB untuk mengemban misi-misi perdamaian. Dalam konteks diplomasi, keberhasilan pasukan TNI dalam misi PBB secara tidak langsung selain memainkan peran diplomasi militer, juga ikut memainkan peran diplomasi publik. Penerapan metode pembinaan teritorial dalam pelaksanaan tugas misi perdamaian oleh TNI dalam pelaksanaannya, komunikasi sosial dan interaksi dengan masyarakat menjadi hal yang rutin dilakukan oleh pasukan TNI. Diplomasi publik merupakan salah satu strategi diplomasi yang dimainkan oleh banyak negara dengan tujuan untuk mempengaruhi

persepsi dan opini masyarakat negara lain melalui pendekatan-pendekatan psikologis guna mencapai agenda dan tujuan politiknya. Hal ini, sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Jarol B. Mainheim, diplomasi publik memiliki arti sebagai usaha sebuah negara untuk mempengaruhi opini publik maupun pemimpin di negara lain dengan maksud untuk mempermudah pencapaian tujuan dari kebijakan luar negerinya²².

Penerapan metode pembinaan teritorial merupakan sarana yang sangat efektif dalam melakukan pendekatan psikologis terhadap masyarakat di daerah tugas. Aplikasi dari metode pembinaan teritorial yang dilakukan oleh pasukan TNI meliputi beberapa hal antar lain; pemberian bantuan terhadap masyarakat sekitar daerah operasi, bantuan ke sekolah-sekolah, pemberian bantuan ke yayasan anak-anak yatim piatu, bantuan medis atau pengobatan terhadap warga sekitar daerah operasi, serta kunjungan dan acara-acara keagamaan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Bukanlah hal yang mengherankan apabila penerimaan masyarakat terhadap TNI di setiap tugas perdamaianya sangat baik. Kemampuan TNI dalam berinteraksi dengan masyarakat serta kepekaan terhadap lingkungan merupakan modal dasar bagi prajurit TNI dalam mengembangkan

²² Jarol B. Mainheim, *Strategic Public Diplomacy : The Evolution of Influence*, (London: Oxford University Press, 1990), hlm. 4.

diplomasi pertahanan terutama terkait penerapan diplomasi publik.

Kemampuan TNI dalam melakukan pendekatan psikologis terhadap masyarakat di daerah penugasan tentu dapat memberikan peluang yang baik dalam diplomasi negara guna mencapai kepentingan nasional, mengingat opini masyarakat dalam suatu negara akan sangat berpengaruh pada kebijakan politik negara tersebut. Beberapa negara telah melakukan pemanfaatan pasukan perdamaianya untuk melakukan diplomasi dengan memperkuat strategi diplomasi publik dalam rangka mencapai tujuan ekonominya. Salah satu contoh negara yang telah melakukan hal tersebut adalah pasukan perdamaian Korea Selatan saat ditugaskan di Lebanon. Keberhasilan diplomasi publik yang dilakukan oleh pasukan perdamaian Korea Selatan telah berhasil mempengaruhi persepsi masyarakat Lebanon terutama terkait produksi kendaraan buatan Korea Selatan. Sayangnya, TNI belum melakukan hal yang sama.

Adapun belum optimalnya pemanfaatan pasukan perdamaian TNI dalam melakukan diplomasi pertahanan untuk tujuan kepentingan ekonomi dapat dikarenakan belum adanya kesamaan pemahaman bahwa kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh institusi manapun bisa menjadi jalan masuk untuk mencapai kepentingan nasional apapun itu bentuk

kepentingannya. Pengiriman pasukan perdamaian TNI masih dianggap sebagai murni urusan pertahanan semata dan tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan nasional lainnya. Pemikiran seperti itulah yang menyebabkan sulitnya terjadi sinkronisasi dalam perumusan strategi diplomasi antar institusi pemerintah secara komprehensif.

Atase Pertahanan RI

Salah satu dimensi diplomasi pertahanan adalah pertukaran atau penempatan atase pertahanan sebagai penyambung lidah kebijakan pertahanan negara. Untuk mengemban fungsi diplomasi pertahanan, peran seorang atase pertahanan sangat penting. Disamping menjalankan tugas pokoknya, atase pertahanan berperan mewujudkan kepentingan pertahanan dan mampu meningkatkan hubungan bilateral melalui peningkatan kualitas hubungan dan kerja sama bidang pertahanan. Dalam pelaksanaan tugas diplomasi, Atase Pertahanan RI menjadi bagian dari misi diplomatik Indonesia di dalam wadah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang dikepalai oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP).

Sebagai bagian dari misi diplomatik Indonesia, sudah selayaknya Atase Pertahanan RI dalam melaksanakan misinya harus sejalan dengan misi diplomatik yang dirumuskan oleh Duta Besar LBBP sebagai *head of mission*. Adanya ketidak-sinkronan antar misi

yang diemban oleh Duta Besar LBBP dengan Atase Pertahanan RI tentu membawa dampak negatif dalam upaya pencapaian kepentingan nasional yang diemban oleh kantor perwakilan diplomatik di suatu negara. Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab hasil penelitian, ada faktor kritical tidak sinkronnya misi Atase Pertahanan RI dengan misi yang dibawa oleh Duta Besar LBBP, yaitu dalam penyusunan *mission paper* oleh Duta Besar LBBP tidak dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Atase Pertahanan RI.

Adanya kesamaan visi antara Duta Besar LBBP selaku kepala kantor perwakilan diplomatik RI di luar negeri dengan komponen pelaku diplomasi termasuk Atase Pertahanan RI di bawah kantor perwakilannya, sangat penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas diplomasi yang diemban oleh kantor perwakilan RI tersebut. Dengan adanya kesamaan visi tersebut, maka akan mempermudah terciptanya sinergitas antar pelaku diplomasi dari berbagai lembaga sehingga kepentingan nasionalpun akan semakin mudah tercapai.

Kapasitas dan Kapabilitas TNI dalam Melaksanakan Diplomasi Pertahanan

Merujuk pada hasil penelitian, diakui bahwa kapasitas dan kapabilitas militer kita masih perlu ditingkatkan, tentu hal tersebut secara tidak langsung

menyiratkan bahwa posisi tawar militer kita dalam diplomasi belum pada level yang ideal. Untuk mencapai kondisi yang ideal suatu angkatan bersenjata sangat bergantung pada alokasi *military budget* yang diberikan oleh negara, dan hal tersebut tidak lepas dari *national budget* atau anggaran belanja negara. Kemampuan finansial yang dimiliki oleh angkatan bersenjata dapat menjadi *bargaining chip* dalam pelaksanaan diplomasi militer. Kemampuan ini sangat ampuh dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara. Hal ini sangat jelas digambarkan dalam pola diplomasi militer yang diterapkan oleh militer Amerika. Metode diplomasi militer Amerika tersebut yaitu disebut dengan *military aid* atau bantuan militer. Setiap tahunnya, Amerika menghabiskan lebih dari miliaran dolar dalam rangka memberikan bantuan militer ke puluhan negara di dunia, dengan harapan bantuan tersebut dapat memperkuat pengaruh Amerika terhadap negara penerima. Dalam hal penanganan terorisme, Amerika telah memberikan bantuan militer kepada banyak negara, antara lain; Azerbaijan, Tajikistan, Pakistan, Ethiopia, Nigeria, Oman, Yemen, Georgia, Uzbekistan, and Columbia. Hasil dari bantuan militer tersebut sangat jelas terlihat ketika Georgia sebagai rasa terima kasihnya bersedia mengirimkan 2000 personel militernya untuk membantu militer Amerika yang sedang berperang di Iraq.

Pola seperti ini menjadi senjata bagi Amerika untuk mengatur kebijakan suatu negara. Bantuan militer menjadi alat tukar Amerika dengan kebijakan negara penerima. Selama negara penerima bersedia merubah kebijakannya untuk sejalan dengan kepentingan Amerika maka selama itu juga bantuan militer terus mengalir.

Contoh pola yang diterapkan militer Amerika dalam memperkuat posisi tawar militernya melalui program *military aid* tentu tidak dapat sepenuhnya kita terapkan dalam diplomasi pertahanan kita, mengingat, kita tahu bersama, kemampuan keuangan negara masih belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan anggaran pertahanan negara. Namun demikian, pola penggunaan bantuan militer bukan merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan kemampuan diplomasi pertahanan. Bantuan militer juga tidak harus selalu terkait dengan bantuan berupa dana atau sumbangan peralatan perang, tetapi bantuan militer dapat diberikan dalam bentuk asistensi militer dalam bidang latihan dan operasi.

Hubungan TNI dengan Kemlu dalam Hal Diplomasi

Dihadapkan pada hubungan antar TNI dengan Kementerian Luar Negeri terutama terkait dengan hal diplomasi, secara umum, dari hasil penelitian terlihat berjalan dengan baik. Komunikasi

rutin terjalin antar kedua lembaga dalam membahas isu-isu diplomasi. Namun, komunikasi yang terjalin baru sebatas pada hal-hal yang bersifat operasional, sedangkan pada tataran kebijakan belum berjalan dengan baik terutama terkait dengan penyusunan strategi diplomasi.

Secara umum, dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di Kementerian Luar Negeri didasarkan pada dua dimensi yaitu yang bersifat reaktif dan rutin (*regular*). Dalam konteks perumusan rutin, Kementerian Luar Negeri akan mendasarkan kegiatan dan kebijakannya berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (*Renja-KL*) tahunan. Perencanaan ini lazimnya dirapatkan satu tahun sebelum waktu anggaran dimulai.

Ada hal krusial yang menjadi penyebab penyusunan strategi diplomasi bersama antara TNI dengan Kementerian Luar Negeri belum bisa berjalan yaitu hingga saat ini Kementerian Luar Negeri belum memiliki *white book* atau *white paper* kebijakan diplomasi yang menjadi rujukan diplomasi secara nasional, meskipun pada tataran formulasi kebijakan *diplomasi on daily basis* koordinasi sudah berjalan baik. *White paper* kebijakan diplomasi merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh kementerian Luar Negeri karena *white paper* tersebut akan menjadi acuan dan koridor penyusunan strategi diplomasi oleh instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan diplomasi.

Kesimpulan

Bedasarkan hasil dan analisa terhadap fokus penelitian yang telah diuarikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Peran diplomasi pertahanan TNI secara umum dilihat dari dua peran yang dimainkan yaitu sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB, TNI telah berperan aktif dalam mendukung diplomasi khususnya diplomasi publik dengan membentuk citra positif TNI dan Indonesia di mata masyarakat di daerah operasi. Namun, keberhasilan TNI dalam diplomasi tersebut belum bisa dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan nasional lainnya khususnya kepentingan bangsa di bidang ekonomi. Diplomasi yang dilakukan TNI dalam keterlibatannya sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB baru sebatas upaya untuk mencapai kepentingan nasional di bidang pertahanan.

Selanjutnya, diplomasi pertahanan TNI dengan mengirimkan Atase Pertahanan RI di suatu negara belum mencapai hasil yang optimal dengan masih ditemukannya mis-komunikasi dan ketidak-sinkronan antara prioritas diplomasi *head of mission*, dalam hal ini duta besar, dengan prioritas diplomasi Atase Pertahanan RI. Kondisi tersebut terjadi karena belum adanya koordinasi dan

sinkronisasi antara kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan *mission paper* kantor perwakilan diplomatik RI.

b. Kapasitas dan kapabilitas TNI dalam mendukung diplomasi pertahanan TNI masih belum berada pada kondisi yang ideal. Kemampuan alutsista dan peralatan tempur TNI masih belum bisa memberikan efek tangkal yang maksimal guna meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata internasional. Selain itu, kemampuan dukungan anggaran untuk menunjang diplomasi pertahanan masih terbatas sehingga keleluasaan dalam melaksanakan diplomasi menjadi terbatas. Kemampuan personil TNI sebagai petugas diplomatik juga terbilang masih terbatas, hal tersebut mengurangi efektifitas TNI dalam melaksanakan diplomasi.

c. Hubungan antara Kementerian Luar Negeri dengan TNI dalam hal diplomasi, secara umum terjalin dengan baik. Hubungan koordinasi dan komunikasi telah berjalan dengan baik pada level operasional di lapangan, namun pada level strategis, terutama dalam penyusunan strategi bersama diplomasi masih belum berjalan dengan baik. Kementerian luar negeri masih belum melibatkan TNI dalam urusan diplomasi pada level strategis meskipun isu diplomasi yang dibahas memiliki relevansi dengan TNI.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , penulis menyampaikan saran-saran yang perlu ditindak lanjuti yaitu

- a. Membuat SOP tentang penyusunan strategi diplomasi di lingkungan TNI untuk mengatur koordinasi pengurusan diplomasi pertahanan TNI, sedangkan pada tataran nasional perlu adanya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antar kementerian untuk mengkoordinir lembaga dan kementerian dalam penyusunan strategi diplomasi sebagai solusi dari belum adanya aturan turunan dari UU Nomor 37 Tahun 1999, tentang Hubungan Luar Negeri. Dengan adanya SOP dan SKB tersebut, maka penyusunan strategi diplomasi baik pada tataran nasional dan khususnya pada tataran TNI dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah.
- b. Menyusun buku putih diplomasi TNI sebagai rujukan dalam penyusunan strategi diplomasi TNI, sehingga arah diplomasi yang dilakukan oleh TNI dapat lebih terukur dan terarah.
- c. Saat ini di dalam TNI belum terdapat unit yang secara khusus membidangi diplomasi pertahanan TNI. Dalam rangka mempermudah penyusunan strategi diplomasi pertahanan TNI, maka perlu dibentuk unit khusus yang secara spesifik membidangi diplomasi pertahanan TNI.

Daftar Pustaka

Buku

- Anitah W, Sri. 2008. *Strategi Pembelajaran Matematika*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- A.M., Luthfiana Chandra, dan Mahrita. 2012. *Defining National Interest*.
- Amstutz, Mark R.. 2013. *International Ethics: Concepts, Theories, and cases in Global Politics 4th Ed*. Boulder: Rowman and Littlefield.
- Hatta, M. 1988. *Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- J., Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Mainheim, Jarol B.. 1990. *Strategic Public Diplomacy: The Evolution of Influence*. London: Oxford University Press.
- Moleong, Lexy J.. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Morgenthau, H.J. 1951. *Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.
- Papp, D. S.. 1988. *Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, Second Editions*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Pedrason, R.. 2015. *Asean Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community*,. Heidelberg: University of Heidelberg.

- Rangkuti, Freddy. 2013. *SWOT Balance Scorecard*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syawfi, I. 2009. *Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi Pemasaran Edisi 3*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Winger, Gregory. 2014. *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy*. Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences.

Jurnal

- Carlsnaes, Walter. 2016. "The Agency-structure Problem in Foreign Policy Ananlysis", *International Study Quarterly*. Vol.36, No.3, hlm. 245-270.
- Covey, Stephen. 1989. "The 7 Habith of Highly Effective People". *Jurnal Pembangunan Jangka Menengah*.
- Holsti, K.J.. 1970. "National Role Conceptions in The Study of Foreign Policy". *International Studies Quarterly*. Vol. 14, No. 3, hlm. 233-309.